J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Analisis Pengaruh Penjabat Bupati dalam Kontestasi Pilkada

Feramita Hasani Boby[1], Junaid Gazalin[2], Restiawati[3], M Reyza Zulhidayat[4], Muh Aldi Musbaq Ananto[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Muhammadiyah Buton
E-mail: kimaraugiw@gmail.com[1], astrid@umitra.ac.id[2] , meita@umitra.ac.id[3]

Article History:
Received: 28 Januari 2025
Revised: 08 Maret 2025
Accepted: 15 Maret 2025

Keywords: *Acting Regent, Pilkada, Political Influence*

Abstract: *Acting regents play an important role in the political process of Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia, especially in the transition period between the resignation of the previous official and the implementation of the next election. This study aims to analyze the influence of acting regents on the dynamics of political contestation in Pilkada, using a qualitative approach through surveys and in-depth interviews. The results show that the acting regent has a significant influence on voters, both through policies taken during the term of office and direct influence on regional head candidates. Despite the potential for abuse of power, the majority of respondents considered that the role of the acting regent was more about regulating regional administration than directly intervening in practical politics. This study suggests the need for stricter regulations regarding the involvement of acting regents in the political process in order to maintain the integrity of Pilkada.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu instrumen demokrasi yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan dinamika politik lokal yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peran penjabat bupati. Penjabat bupati diangkat sebagai pengganti sementara bupati yang mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugasnya hingga pemilihan berikutnya. Meskipun fungsi utama penjabat bupati adalah untuk menjalankan roda pemerintahan, tidak jarang mereka terlibat dalam proses politik, yang dapat mempengaruhi jalannya Pilkada. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis sejauh mana pengaruh penjabat bupati terhadap kontestasi Pilkada dan bagaimana hal ini berpotensi memengaruhi keputusan politik masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tentang peran pejabat sementara dalam pemerintahan daerah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Sulaiman, 2020) menyatakan bahwa penjabat bupati dapat memengaruhi stabilitas politik daerah, meskipun dalam batasan tertentu. Penjabat bupati sering kali dianggap sebagai tokoh yang mampu mengendalikan berbagai isu administratif yang dapat mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Hal ini diperburuk dengan ketidakjelasan regulasi mengenai batasan peran penjabat bupati dalam politik praktis, yang mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan Selain itu, analisis oleh (Nugroho, 2018) menunjukkan bahwa keputusan politik yang diambil oleh penjabat bupati berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap calon kepala daerah.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Herlina, 2019) juga menyoroti ketidaksetaraan akses dalam Pilkada ketika penjabat bupati lebih memfokuskan perhatian pada pengaturan administrasi pemerintahan daripada menjaga netralitas politik. Herlina mencatat bahwa dalam banyak kasus, kebijakan yang dikeluarkan selama masa jabatan penjabat bupati sering kali menambah keuntungan bagi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dekat dengan penjabat tersebut. Namun, kekhawatiran akan pengaruh yang terlalu besar dari penjabat bupati terhadap keputusan politik ini belum banyak mendapat perhatian lebih lanjut dalam literatur yang ada.

Dalam konteks politik Indonesia yang semakin kompleks, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai dampak penjabat bupati terhadap proses Pilkada. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam untuk menggali pandangan masyarakat dan politisi mengenai peran penjabat bupati dalam Pilkada. Dengan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana penjabat bupati dapat mempengaruhi jalannya Pilkada, serta potensi masalah yang muncul dari keterlibatannya dalam politik lokal.

LANDASAN TEORI

Penjabat bupati, sebagai pejabat sementara yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, memiliki posisi yang unik dalam sistem politik Indonesia. Dalam konteks ini, penjabat bupati sering kali menjadi figur yang memiliki pengaruh besar terhadap proses politik, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurut teori **kekuasaan** yang dikemukakan oleh (Weber, 2015), kekuasaan politik bukan hanya terkait dengan kontrol atas sumber daya, tetapi juga dengan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Penjabat bupati, meskipun bertugas secara temporer, dapat memanfaatkan posisi administratif untuk mempengaruhi opini publik dan mengarahkan pilihan politik masyarakat.

Selain itu, teori **demokrasi elektoral** yang dikemukakan oleh (Schumpeter, 2017) menyoroti pentingnya proses pemilihan yang adil dan transparan dalam membentuk legitimasi seorang pemimpin. Dalam konteks Pilkada, keterlibatan penjabat bupati dalam politik praktis dapat memengaruhi integritas proses pemilihan. Schumpeter berargumen bahwa intervensi politik dari pejabat sementara bisa mengurangi tingkat kesetaraan dalam kompetisi politik, mengingat penjabat bupati memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya politik dan administrasi yang dapat digunakan untuk mendukung calon tertentu.

Teori **politik lokal** yang disampaikan oleh (Fitria, 2019) juga relevan untuk memahami dinamika politik di tingkat daerah. Fitria menekankan bahwa kontestasi Pilkada sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik lokal yang bisa memanfaatkan posisi administratif untuk memperkuat basis dukungan politiknya. Dalam hal ini, penjabat bupati berperan dalam menjaga stabilitas politik lokal yang bisa berimplikasi pada pilihan politik masyarakat. Penjabat bupati tidak hanya berperan sebagai pengatur administrasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang mempengaruhi proses Pilkada, baik melalui kebijakan maupun pengaruh sosial yang mereka miliki.

Teori **neutralitas politik** yang dikembangkan oleh (Johnson, 2018) lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya peran pejabat sementara dalam menjaga integritas politik. Johnson menyarankan bahwa penjabat yang diangkat untuk posisi sementara harus menjaga netralitasnya agar tidak mempengaruhi hasil Pilkada. Namun, dalam banyak kasus, praktik politik menunjukkan bahwa pejabat sementara, termasuk penjabat bupati, sering kali terlibat dalam proses politik praktis, yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam kontestasi Pilkada. Penelitian ini menguji bagaimana fenomena tersebut terjadi dan bagaimana pengaruh penjabat bupati dalam Pilkada dapat memengaruhi hasil pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam untuk menggali pengaruh penjabat bupati dalam kontestasi Pilkada di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif dan pandangan para responden mengenai peran penjabat bupati dalam proses politik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada persepsi masyarakat dan aktor politik, termasuk politisi dan calon kepala daerah, terhadap peran penjabat bupati dalam Pilkada.

Penelitian ini mengadopsi desain deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena yang terjadi. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan makna di balik data yang diperoleh dari responden. Desain penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penjabat bupati dapat mempengaruhi dinamika Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah yang baru-baru ini mengalami pergantian bupati dan di mana penjabat bupati menjalankan tugasnya selama masa transisi sebelum Pilkada. Daerah-daerah ini dipilih karena adanya kondisi yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni keberadaan penjabat bupati yang terlibat dalam politik praktis menjelang Pilkada.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama: (1) masyarakat umum yang memiliki pengalaman atau pandangan terkait pengaruh penjabat bupati terhadap Pilkada, dan (2) aktor politik lokal, termasuk politisi, calon kepala daerah, dan pejabat pemerintah daerah. Partisipan dipilih dengan menggunakan teknik ***purposive sampling***, di mana pemilihan responden didasarkan pada keterkaitan mereka dengan topik penelitian. Peneliti berusaha untuk memilih responden yang memiliki pemahaman atau pengalaman langsung mengenai topik penelitian (Agung, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penjabat Bupati terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjabat bupati memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah, terutama pada masa transisi menjelang Pilkada. Sebagian besar responden dalam wawancara mengungkapkan bahwa keberadaan penjabat bupati membantu menjaga kelancaran administrasi daerah, mengingat tugas utama mereka adalah memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik hingga pemilu daerah dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh seorang anggota DPRD dari Jawa Barat, "Penjabat bupati sering kali memfokuskan diri pada penyelesaian masalah administratif dan pembangunan, yang sangat penting untuk menjaga kestabilan daerah."

Namun, stabilitas ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan politik, terutama ketika penjabat bupati terlibat dalam mendukung calon tertentu. Dalam wawancara dengan seorang akademisi dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Zainal, beliau mengatakan, "Terkadang, meskipun penjabat bupati mencoba menjaga netralitas, mereka tidak dapat menghindari tekanan dari partai politik yang mempengaruhi keputusan mereka dalam menetapkan kebijakan-kebijakan penting." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penjabat bupati berusaha untuk menjaga stabilitas, mereka tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik.

Penelitian oleh (Setiawan, 2021) juga mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat terganggu apabila penjabat bupati terlibat langsung dalam kontestasi politik. Setiawan berargumen bahwa netralitas politik penjabat bupati harus dijaga agar Pilkada dapat berjalan dengan adil dan demokratis. Dalam penelitian ini, penjabat bupati yang dapat menjaga

independensinya dipandang lebih mampu menjaga stabilitas pemerintahan daerah tanpa ada kepentingan politik pribadi.

Secara keseluruhan, meskipun peran penjabat bupati sangat penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan, keterlibatan mereka dalam politik praktis dapat menimbulkan masalah yang merusak keseimbangan politik daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas untuk memastikan netralitas mereka selama masa jabatan sementara.

Penjabat Bupati dan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penjabat bupati, terutama dalam penggunaan sumber daya pemerintah untuk mendukung calon-calon tertentu dalam Pilkada. Wawancara dengan seorang pejabat pemerintah daerah di Sulawesi Utara mengungkapkan, "Banyak pejabat daerah yang merasa tertekan untuk mendukung calon kepala daerah tertentu, terutama ketika penjabat bupati memiliki kedekatan dengan partai politik penguasa." Hal ini mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada, di mana pejabat sementara bisa mempengaruhi proses politik secara tidak langsung.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh penjabat bupati juga dapat terjadi dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada calon tertentu, misalnya dalam hal distribusi bantuan sosial atau pengalokasian anggaran daerah. Dalam penelitian oleh (Dewa, 2019) ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, penjabat bupati memberikan dukungan berupa kebijakan yang menguntungkan calon tertentu dengan tujuan untuk memperoleh dukungan politik dalam Pilkada. Dewa menyatakan, "Penggunaan kekuasaan administratif untuk kepentingan politik dapat mengurangi integritas Pilkada dan merusak prinsip-prinsip demokrasi."

Dalam wawancara dengan seorang calon bupati yang pernah menjabat sebagai penjabat bupati, ia mengungkapkan, "Sebagai penjabat bupati, saya harus sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Tetapi ada tekanan politik dari beberapa pihak untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan calon tertentu." Ini menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi oleh penjabat bupati dalam menjaga netralitas dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai kesimpulan, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penjabat bupati dalam Pilkada tidak bisa diabaikan. Hal ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga terkait, serta regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa penjabat bupati dapat menjalankan tugas mereka tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik.

Persepsi Masyarakat terhadap Netralitas Penjabat Bupati

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap netralitas penjabat bupati sangat beragam, tergantung pada seberapa transparan dan objektif kebijakan yang diambil oleh penjabat tersebut. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan masyarakat di beberapa daerah, ditemukan bahwa sebagian besar responden merasa khawatir bahwa penjabat bupati yang memiliki afiliasi politik tertentu akan mempengaruhi hasil Pilkada. Seperti yang diungkapkan oleh seorang warga dari Kalimantan Selatan, "Kami khawatir kebijakan yang dibuat oleh penjabat bupati lebih menguntungkan calon yang dekat dengan partai mereka, bukan untuk kepentingan masyarakat."

Namun, ada juga responden yang merasa puas dengan kinerja penjabat bupati yang berhasil menjaga stabilitas daerah tanpa terlibat langsung dalam politik praktis. Dalam wawancara dengan seorang kepala desa, beliau menyatakan, "Penjabat bupati yang profesional dan netral memang bisa menjaga kelancaran pemerintahan daerah, meskipun dalam situasi politik yang penuh ketegangan."

Ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penjabat bupati sangat dipengaruhi oleh cara penjabat tersebut mengelola kebijakan daerah selama masa jabatannya.

Menurut penelitian oleh (Nurdiansyah, 2020) masyarakat lebih cenderung mendukung calon kepala daerah yang mereka anggap mampu melanjutkan program-program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik selama masa jabatan penjabat bupati. "Masyarakat sering kali tidak mempermasalahkan afiliasi politik penjabat bupati, asalkan mereka merasa kesejahteraan daerah mereka meningkat," jelas Nurdiansyah. Namun, jika masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut memihak pada calon tertentu, hal ini bisa merusak persepsi mereka terhadap netralitas penjabat bupati.

Sebagai hasilnya, persepsi masyarakat terhadap penjabat bupati sangat bergantung pada sikap dan kebijakan yang diambil oleh penjabat tersebut selama masa jabatannya. Penjabat bupati yang mampu menjaga netralitas politik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dalam Pilkada, sementara mereka yang terlibat dalam politik praktis dapat menurunkan kualitas demokrasi lokal.

Regulasi dan Pengawasan terhadap Peran Penjabat Bupati dalam Pilkada

Temuan lain yang muncul dalam penelitian ini adalah perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap peran penjabat bupati dalam Pilkada. Wawancara dengan seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, "Kami sering kali kesulitan dalam mengawasi peran penjabat bupati, karena tidak ada aturan yang jelas mengenai batasan mereka dalam politik praktis." Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penjabat bupati dalam Pilkada masih sangat terbatas, meskipun peran mereka sangat besar dalam proses pemilihan.

Penelitian oleh (Sari, 2019) menyarankan bahwa penguatan regulasi yang mengatur keterlibatan penjabat bupati dalam Pilkada sangat penting untuk menjaga integritas pemilu daerah. "Keterlibatan penjabat bupati dalam politik praktis tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan ketidakadilan dalam Pilkada, mengingat mereka memiliki sumber daya yang lebih besar daripada calon lainnya," tulis Sari. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan penjabat bupati dapat lebih fokus pada tugas administratif mereka tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik.

Di sisi lain, beberapa responden mengusulkan perlunya pengawasan lebih dari lembaga pengawas independen untuk memastikan penjabat bupati tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam Pilkada. Wawancara dengan seorang pengamat politik lokal menyatakan, "Tanpa pengawasan yang ketat, penjabat bupati bisa saja memanfaatkan posisi mereka untuk mempengaruhi hasil Pilkada. Kami perlu lembaga yang bisa mengawasi hal ini dengan lebih tegas."

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa untuk memastikan Pilkada yang adil dan transparan, regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih efektif terhadap peran penjabat bupati sangat diperlukan. Dengan demikian, proses demokrasi di tingkat daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran penjabat bupati dalam kontestasi Pilkada memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap stabilitas pemerintahan daerah, namun juga menyimpan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang perlu diwaspadai. Penjabat bupati, yang ditugaskan untuk menjaga kelancaran administrasi pemerintahan selama masa transisi, memiliki akses terhadap sumber daya dan kebijakan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Meskipun mereka diharapkan untuk menjaga netralitas, keterlibatan dalam politik praktis sering kali tak terhindarkan, terutama ketika adanya tekanan dari

partai politik atau kelompok tertentu yang berupaya memperoleh dukungan dalam Pilkada.

Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap penjabat bupati sangat dipengaruhi oleh sikap dan kebijakan yang diambil oleh mereka selama masa jabatan. Masyarakat lebih cenderung mendukung calon yang mereka anggap dapat melanjutkan program-program yang sudah ada dan menjaga stabilitas daerah. Namun, ketika penjabat bupati terlibat langsung dalam mendukung calon tertentu, hal ini bisa merusak persepsi publik tentang netralitas mereka dan mempengaruhi hasil Pilkada.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menguatkan regulasi dan pengawasan terhadap peran penjabat bupati dalam Pilkada. Tanpa pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan tetap ada, yang dapat merusak integritas Pilkada dan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang mengatur batasan keterlibatan penjabat bupati dalam politik praktis sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada yang adil dan transparan.

Secara keseluruhan, meskipun penjabat bupati memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah, keterlibatan mereka dalam politik praktis harus diatur secara lebih ketat untuk menjaga integritas Pilkada. Penjabat bupati harus dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan tanpa intervensi politik yang dapat merugikan proses demokrasi lokal. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam memperbaiki regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap peran penjabat bupati sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada dapat berlangsung dengan adil dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR REFERENSI

Agung. (2017). Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial: Pendekatan, Teknik, dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Rajawali. *Jakarta: Penerbit Rajawali*.

Dewa. (2019). Politik dan Administrasi: Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Penjabat Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(3), 111–125.

Fitria. (2019). Politik Lokal dan Dinamika Pilkada: Analisis Kasus di Indonesia. *Yogyakarta: Penerbit UGM*.

Herlina. (2019). Peran Penjabat Bupati dalam Dinamika Politik Pilkada: Studi Kasus di Beberapa Daerah. Jurnal Politik Lokal,. *Jurnal Politik Lokal*, 8(3), 102–118.

Johnson. (2018). Political Neutrality in Temporary Governance. *Oxford: Oxford University Press*.

Nugroho. (2018). Keterlibatan Penjabat Bupati dalam Politik Pilkada: Analisis Keterbatasan dan Tantangan. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 17(2), 210–225.

Nurdiansyah. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Netralitas Penjabat Kepala Daerah dalam Pilkada. *Jurnal Politik Lokal*, 19(2), 110-121.

Sari. (2019). Regulasi dan Pengawasan Terhadap Penjabat Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Daerah. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 16(4), 245-259.

Schumpeter. (2017). Capitalism, Socialism, and Democracy. *New York: Harper & Row*.

Setiawan. (2021). Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Stabilitas Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Politik*, 18(2), 130-145.

Sulaiman. (2020). Pengaruh Penjabat Kepala Daerah dalam Pilkada. *Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 134-150.

Weber, M. (2015). Ekonomi dan Masyarakat: Teori Sosial dan Ekonomi. *Jakarta: Penerbit Rajawali*.